

**Judul** : Vaksinasi Jangan Komersial  
**Tanggal** : Senin, 12 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 9

## Vaksinasi Jangan Komersial

Harga pembelian vaksin tertinggi sebesar Rp 321.660 per dosis, sedangkan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pemerintah membuka jalur vaksinasi individu melalui klinik Kimia Farma dan fasilitas kesehatan swasta lainnya, yang biayanya dibebankan kepada individu bersangkutan. Karena berorientasi pada vaksinasi publik, perusahaan tidak boleh mengambil untung atau melakukan komersialisasi dalam layanan tersebut.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 terkait pelaksanaan vaksinasi yang diundangkan 6 Juli 2021 menyebutkan, vaksinasi gotong royong juga mencakup pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau perseorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Terkait hal itu, pada 9-10 Juli 2021, Kimia Farma mengadakan peluncuran perdana (*soft launching*) vaksin gotong royong individu. Per 12 Juli 2021, badan usaha milik negara (BUMN) tersebut membuka layanan vaksin gotong royong di 8 titik, yakni Kimia Farma Senen, Jakarta, dengan kapasitas 200 orang per hari; Kimia Farma Pulogadung Jakarta (200 orang per hari); dan Kimia Farma Blok M, Jakarta (100-200 orang per hari).

Selain itu, Kimia Farma Supratman, Bandung (200 orang per hari); Kimia Farma Citarum, Semarang, (100 orang per hari); Kimia Farma Sukoharjo, Solo (500 orang per hari); Kimia Farma Sedati, Sidoarjo (200 orang per hari); serta Kimia Farma Batubulan, Bali (100 orang per hari).

Ketua Center for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia Hasbullah

### Peraturan Penanggulangan Pandemi Covid-19

Sejumlah perbedaan antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

	Peraturan Menteri Kesehatan No 19/2021	Peraturan Menteri Kesehatan No 10/2021
<b>Pasal 1 angka 5</b>	Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha	Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha
<b>Pasal 19 Ayat 1</b>	Pendistribusian vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma/Perseorangan kepada: • Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong; dan • Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/orang perorangan.	Pendistribusian Vaksin COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma (Perseorangan) ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan No 19/2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 10/2021. Ditinjau dari UUP HASTIH B. 2020/11

Thabrany menilai keberadaan vaksinasi individu yang biayanya dibebankan kepada pribadi tak masalah sebagai komplementer vaksinasi program yang diselenggarakan pemerintah secara gratis.

"Dalam memperoleh vaksin, ada kelompok masyarakat yang ingin lebih fleksibel dari sisi giliran. Artinya, mereka membayar untuk fleksibilitas tersebut. Namun, yang patut digarisbawahi, jangan sampai ada *financial interest* berupa pengambilan untung yang dikenakan kepada individu tersebut. Pengambilan untung itu tidak etis di tengah situasi seperti ini, apalagi dilakukan BUMN," katanya saat dihubungi, Minggu (11/7/2021).

Karena vaksinasi Covid-19 berorientasi pada kebutuhan

publik, lanjutnya, pengambilan untung sebaiknya tidak diperbolehkan. Penentuan harga mesti terbuka. Pemerintah harus mengawasi pengenaan biaya vaksinasi gotong royong individu tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui Penunjukan PT Bio Farma (Perseorangan) dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi gotong royong, harga pembelian vaksin tertinggi Rp 321.660 per dosis, sedangkan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Harga tersebut sudah termasuk margin keuntungan

pembelian vaksin sebesar 20 persen dan pelayanan vaksinasi 15 persen.

Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma (Perseorangan) Bambang Heriyanto mengatakan, Keputusan Menteri Kesehatan, "Struktur harga sudah jelas pada keputusan tersebut. Margin sudah ditetapkan. Tidak ada yang ditutupi," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu.

Dia menggarisbawahi, Vaksinasi gotong royong individu ditujukan untuk masyarakat yang belum menerima vaksin dosis pertama dan kedua, bukan untuk *booster*.

Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno mengatakan, tidak ada unsur komersialisasi dalam vaksinasi gotong royong indi-

vidu. Menurut dia, ada permintaan dari kelompok masyarakat tertentu terhadap jalur vaksinasi tersebut.

Selain itu, dia menyatakan, vaksinasi gotong royong individu yang diprioritaskan di wilayah Jawa-Bali dijalankan untuk memperluas akses vaksin dalam rangka membangun kekebalan komunitas (*herd immunity*). Kanal vaksinasi tersebut tidak mengambil jatah dari jalur lainnya. Hingga saat ini, terdapat 40.000 dosis vaksin yang siap digelontorkan lewat vaksinasi gotong royong individu.

### Vaksinasi perusahaan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap keberadaan program vaksin individu yang berbayar tidak sampai mengganggu kuota vaksinasi gotong royong bagi dunia usaha yang sudah mengantre untuk memvaksin karyawannya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, mempertanyakan kemunculan program vaksinasi individu. Menurut dia, pemerintah selama ini belum pernah membicarakan program tersebut dengan DPR. Saleh menilai program tersebut bertentangan dengan komitmen awal pemerintah serta prinsip dasar vaksinasi yang seharusnya diberikan gratis. (AGE/BKY/JUD)

[klik.kompas.id/ekonomi](http://klik.kompas.id/ekonomi)



Baca artikel lainnya seputar Ekonomi di Kompas.id dengan memindai QR Code.



KOMPAS